

Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar

Febriandi

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

zfebriandi@gmail.com

Diserahkan: 29 Desember 2017; diterima: 10 Mei 2018

ABSTRACT

Saudi Arabia and Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. Qatar's diplomatic relations with Saudi enemies were also a big problem in this crisis. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea, and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Saudi demands are considered excessive and baseless. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. Based on the findings in the field, it seems that Qatar's role as one of the rising states in the region has made Saudi Arabia's coercive diplomacy useless. Qatar's military and economic capacity was one of the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia in this crisis. This paper will use the concept of coercive diplomacy from Alexander L. George with a descriptive qualitative approach. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar.

Keywords: *coercive diplomacy, Qatar, Saudi Arabia, diplomatics, blockade.*

ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Hubungan diplomatik Qatar dengan musuh-musuh Saudi juga menjadi perhatian dalam krisis ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik tersebut. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Saudi. Tuntutan Saudi dianggap berlebihan dan tidak berdasar. Tulisan ini akan membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutu terhadap Qatar. Berdasarkan temuan di lapangan, tampaknya peran Qatar sebagai salah satu *rising state* di kawasan membuat diplomasi koersif Arab Saudi menjadi sia-sia. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar menjadi salah satu faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi dalam krisis ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini akan menggunakan konsep *coercive diplomacy* dari Alexander L. George melalui pendekatan

kualitatif deskriptif. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar.

Kata Kunci: diplomasi koersif, Qatar, Arab Saudi, diplomatik, blokade.

PENDAHULUAN

Pada Juni 2017 Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang membuat situasi di kawasan Timur Tengah kembali memanas (Feride, 2017). Arab Saudi dan sekutu menuduh Qatar sebagai negara yang aktif mendukung terorisme dan ekstremisme, mendukung propaganda yang kerap dimuat oleh Al-Jazeera, dan juga membaiknya hubungan Doha-Teheran. Qatar telah berani dalam mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Pada Mei 2017, Qatar menggunakan pengaruhnya untuk mendorong Hamas mengeluarkan dokumen kebijakan yang dilihat oleh beberapa orang sebagai upaya untuk melunakkan citra ekstremisnya. Tetapi dukungan untuk Hamas membuat Qatar berselisih dengan banyak negara, seperti AS, yang memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Imbas dari tuduhan-tuduhan tersebut berujung pada blokade darat, laut, dan udara yang dilakukan Saudi dan sekutu terhadap Qatar dan pemutusan hubungan diplomatik atas dasar alasan keamanan regional.

Dalam hal geografi dan demografi, Qatar merupakan negara kecil terutama dibandingkan tetangganya yaitu Arab Saudi dan Iran. Fakta itu telah memaksa Doha untuk lebih mengandalkan tindakan keseimbangan diplomatik yang berhati-hati untuk mengamankan keamanan nasional dan kepentingannya. Misalnya, sebelum krisis antara Qatar dan Saudi ini berlangsung, Qatar dapat bekerja sama dan

sepemikiran dengan Arab Saudi di sejumlah isu-isu regional seperti Suriah dan Yaman. Sementara Doha juga mengadvokasi dialog yang lebih besar antara negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Iran, negara itu memilih menentang sanksi ekonomi internasional terhadap program nuklir Iran pada 2006 ketika Qatar menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Bakeer, 2018).

Pada awal krisis di Teluk ini, kesenjangan kekuatan antara Qatar dengan Saudi terlihat sangat jelas. Jika Arab Saudi dan sekutu mengambil tindakan militer ke Qatar maka besar kemungkinan Qatar akan sulit mempertahankan negaranya (Bakeer, 2018). Turki yang langsung meratifikasi perjanjian militer dengan Qatar langsung mengerahkan pasukannya ke Doha karena Turki menyadari niat dari blok Saudi, sehingga keputusan itu dilakukan demi mencegah krisis meningkat menuju tindakan militer, dan itu memberi waktu yang diperlukan oleh Qatar untuk memulai tindakan pengadaan militer. Doha telah melakukan perbelanjaan alat militer sekitar USD 30 miliar sejak dimulainya krisis pada pertengahan 2017 lalu yang menandai sejarah baru dalam pembelanjaan pertahanan Qatar (Daily Mail, 2018). Arab Saudi dan sekutu mengajukan 13 syarat agar Qatar bisa terbebas dari blokade. Beberapa syarat di antaranya adalah Qatar harus memutuskan dukungan terorisme dan memutuskan hubungan dengan Iran dan Turki. Syarat yang diajukan oleh Arab Saudi itu harus dilaksanakan dalam waktu 10 hari, akan

tetapi Qatar menolak untuk patuh terhadap Saudi. Qatar beranggapan Saudi mencoba untuk mendominasi kawasan dan menuding tuntutan Saudi tersebut sebagai sesuatu yang tidak berdasar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang muncul adalah terdapat beberapa faktor yang membuat diplomasi koersif yang dilakukan oleh Saudi gagal. Maka pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan dalam tulisan ini adalah mengapa Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan Arab Saudi dan sekutu agar terlepas dari blokade?

Kajian terdahulu tentang krisis diplomasi di Timur Tengah menekankan pada tiga isu besar tentang (1) kebijakan luar negeri; (2) konflik kawasan; dan (3) resolusi konflik. Pada isu pertama dalam kajian terdahulu pada isu kebijakan luar negeri membahas tentang pelaksanaan diplomasi koersif sebagai kebijakan luar negeri (Jervis, 2013; Sauer, 2007; Jentleson, 1991; Shield, 2018). Diplomasi koersif akan sulit terlaksana karena berbagai faktor negara yang diancam, seperti kekuatan lawan dan bagaimana lawan mempunyai kekuatan untuk melawan balik. Mereka berpendapat bahwa diplomasi koersif cenderung sulit untuk dilaksanakan walaupun faktor-faktor yang menjadi ukuran keberhasilan dalam menjalankan diplomasi koersif terpenuhi semua. Kemudian terdapat tulisan mengenai kebijakan luar negeri Qatar yang dianggap bertentangan dengan norma-norma anggota GCC (Dorsey, 2015; Fahy, 2018; Cooper *et al.*, 2011; Rabi, 2009; Robert, 2014). Qatar dianggap sebagai negara yang cenderung menjalankan diplomasi dan berhubungan dengan negara lain tanpa mengikuti norma-norma yang berlaku di GCC, seperti normalisasi

hubungan dengan Israel dan juga menjalin persahabatan dengan Amerika Serikat tapi pada waktu yang sama menjalin hubungan baik dengan Iran dan berhubungan dengan organisasi-organisasi seperti *Muslim Brotherhood* dan *Hamas* yang menjadi musuh bagi Amerika Serikat dan juga Arab Saudi. Qatar selama ini juga dikenal sebagai negara yang selalu menjadi mediator dalam beberapa konflik yang ada baik di kawasan maupun di beberapa wilayah Afrika (Akpınar, 2015; Kamrava, 2011). Tulisan tersebut menjabarkan bagaimana selama ini Qatar aktif memainkan peran diplomasi dalam memediasi negara-negara konflik bersama.

Selanjutnya kategori kedua pada kajian terdahulu membahas tentang konflik kawasan yang menjabarkan bagaimana sejarah terjadinya konflik di kawasan dan konsekuensi yang dihadapi negara-negara GCC (Khalidi, 1991) dan juga membahas konflik yang terjadi antara negara-negara anggota GCC dengan Iran (Shayan, 2013; Bahi, 2017; Pradhan, 2011). Sejarah terjadinya konflik di kawasan teluk cukup panjang terlebih jika masuk dalam ranah sektarian dan ideologi. Masuknya Amerika Serikat yang mendukung negara-negara GCC dianggap demi kepentingan keamanan negara-negara anggota dan di sisi lain kehadiran Amerika Serikat di GCC membuat Iran merasa terancam.

Kategori ketiga dalam kajian terdahulu membahas bagaimana resolusi konflik yang dilakukan negara-negara teluk dan tentang peran GCC dalam menyelesaikan konflik di kawasan (Heard-Bey, 2006). Dalam tulisan tersebut juga menunjukkan bagaimana GCC tidak mempunyai kapabilitas militer atau solusi bersama yang dicapai sehingga perannya tidak efektif dalam memediasi konflik-

konflik yang terjadi di antara negara-negara anggota seperti saat perang Iraq-Iran tahun 1980.

Ketiga kajian terdahulu tersebut telah menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri yang menggunakan diplomasi koersif cenderung gagal dan menjabarkan sejarah konflik yang pernah ada di kawasan Teluk juga bagaimana ketidakefektifan GCC dalam menyelesaikan masalah. Pada tulisan ini penulis mencoba menawarkan analisis baru dengan menjabarkan tentang *small state behavior* dalam menghadapi krisis diplomatik sehingga dapat menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pemicu Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan Saudi demi terlepas dari blokade. Qatar sebagai negara kecil yang diblokade oleh Arab Saudi lebih memilih blokade terjadi daripada harus menuruti persyaratan Arab Saudi yang dianggap tidak berdasar.

Diplomasi koersif biasanya dilakukan oleh negara-negara superpower terhadap negara non superpower. Tulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan pembahasan tentang diplomasi koersif yang tidak hanya dilakukan oleh negara superpower. Pada tulisan ini akan menggunakan *coercive diplomacy theory* untuk menjelaskan faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Oleh sebab itu, tulisan ini menjelaskan operasionalisasi dari *coercive diplomacy theory* melalui perspektif Qatar sebagai bentuk respon terhadap ancaman eksternal dan ultimatum yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, termasuk di dalamnya ialah sejarah permusuhan Saudi-Qatar dan faktor kedekatan Qatar dengan negara-negara hegemoni di kawasan selain Arab Saudi. Penelitian ini hanya terbatas pada analisa terhadap contoh kasus yang dipilih di

mana akan menjabarkan faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan Saudi demi terlepas dari blokade.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Qatar menolak tuntutan Arab Saudi dan sekutu agar terlepas dari blokade. Adapun signifikansi yang ingin dicapai pada tulisan ini, yaitu (1) menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan diplomasi koersif dari suatu negara terhadap negara lain dalam ilmu Hubungan Internasional; (2) Memberikan kontribusi teoritis terhadap kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain pada konflik antar negara; (3) Menambah khasanah pembahasan mengenai diplomasi koersif yang tidak hanya dilakukan oleh negara superpower terhadap negara non superpower, namun antar sesama negara non superpower.

KERANGKA PEMIKIRAN

Coercive Diplomacy

Diplomasi merupakan sebuah jalan yang dianggap lebih memiliki efektivitas dan efisiensi dibandingkan dengan perang untuk menjaga kestabilan perdamaian dunia. Tujuan praktik diplomasi adalah mencari jalan keluar dari sebuah konflik antara dua negara, di mana solusi yang dicapai dalam proses diplomasi mengandung kepentingan dari masing-masing negara yang berkonflik. Diplomasi memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah *Coercive Diplomacy*. Diplomasi jenis ini merupakan jenis diplomasi yang menggunakan ancaman kepada pihak lawan agar menunda aksinya atau bahkan membatalkan aksinya (Lauren *et al.*, 2007). Diplomasi koersif berbeda dengan

deterrence. *Deterrence* merupakan langkah yang dilakukan untuk menghalangi musuh melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, sedangkan diplomasi koersif merupakan sebuah respon atas apa yang telah dilakukan.

Coercive Diplomacy memiliki dua jenis pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan *full-ultimatum* dan *try-and-see*. Di dalam pendekatan *full-ultimatum* terdapat tiga aspek penting yang harus ada dalam tuntutan tersebut, aspek yang pertama adalah adanya tuntutan yang spesifik dan jelas kepada negara sasaran, aspek yang kedua adalah adanya pemberian tenggang waktu kepada negara sasaran untuk bekerja sama, dan yang terakhir adalah ancaman yang jelas apabila negara sasaran tidak mau mengikuti kerja sama atau tuntutan yang diberikan oleh negara pelaku. Pendekatan *try-and-see* tidak jauh berbeda dengan *full-ultimatum*. Namun, dalam pendekatan *try-and-see* hanya mempertimbangkan aspek pemberian tuntutan yang spesifik dan jelas, mengenai tenggang waktu dan ancaman yang jelas akan diberikan kemudian. Sesuai dengan namanya, metode *try-and-see* mencoba melihat reaksi negara sasaran atas *coercive diplomacy* yang dilakukan oleh negara pelaku. Setelah melihat reaksi yang diberikan, maka negara pelaku dapat merencanakan langkah selanjutnya.

Tiga elemen yang mencirikan diplomasi koersif adalah permintaan, ancaman, dan tekanan waktu. Pertama, permintaan khusus harus diformulasikan *vis-a-vis*. Tujuan dari permintaan adalah untuk menghentikan atau membalikkan tindakan yang telah dimulai oleh lawan. Karena permintaan ini dilengkapi dengan ancaman, permintaan harus dipahami sebagai persyaratan. Keberhasilan atau

kegagalan diplomasi koersif tergantung pada apakah permintaan akan dieksekusi. Kedua, permintaan harus didukung oleh ancaman. Ide umum diplomasi koersif adalah untuk mendukung permintaan seseorang terhadap musuh dengan ancaman hukuman untuk tidak kepatuhan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebagian besar waktu ancaman harus dibuat eksplisit. Ancaman dapat didukung oleh tindakan agar dapat membantu meyakinkan lawan bahwa ancaman itu nyata. Ketiga, diplomasi koersif juga membutuhkan semacam tenggang waktu. Peter Jakobsen menyatakan bahwa: "Para penentang tidak akan menganggap ancaman kekuatan sebagai kredibel kecuali jika disertai dengan batas waktu untuk kepatuhan." Negara pelaku harus menggunakan *coercing power*nya untuk menciptakan solusi yang lebih membuat negara sasaran menganggap itu adalah kebutuhan dibandingkan ancaman terhadap negara tersebut, dan ketakutan dari negara sasaran akan meningkatnya tuntutan jika tuntutan sebelumnya tidak dipenuhi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi acuan bagi sukses atau tidaknya diplomasi koersif yang dilakukan oleh suatu negara. Poin pertama adalah apakah tujuan yang mendasarinya sah? Jika opini publik di negara-negara yang mengancam percaya bahwa tujuan akhir tidak sah, maka akan sulit bagi para pengambil keputusan di negara yang mengancam untuk mempertahankan kebijakan diplomasi koersif ini untuk jangka panjang, terutama di negara-negara demokratis. Jika opini publik di negara yang terancam tidak menemukan tujuan mendasar yang sah, itu akan mendukung pemerintahnya dalam melawan tekanan

eksternal. Lalu poin kedua adalah apakah lawan percaya bahwa akan ada lebih banyak tuntutan muncul di masa depan? Jika lawan percaya bahwa lebih banyak permintaan akan muncul di masa depan, negara tersebut tidak akan mau patuh. Negara yang mengancam harus membuat secara jelas apa tujuan keseluruhan dan apa solusi definitif akan ditawarkan. Poin selanjutnya adalah apakah ancaman itu bersifat kredibel? Kredibilitas ancaman merupakan faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan diplomasi koersif. Kredibilitas ancaman tergantung pada empat faktor, yaitu (1) apakah ancamannya sebanding dengan permintaan? Jika ancaman tidak sebanding dengan permintaan, maka tidak akan dianggap kredibel; (2) apakah opini publik mendukung ancaman dan konsekuensi potensinya? Sanksi, misalnya, juga dapat merugikan ekonomi negara yang mengancam, yang dapat mencegah penggunaan diplomasi paksaan di tempat pertama; (3) apakah negara terancam takut semacam eskalasi? Jika ini masalahnya, diplomasi koersif menjadi lebih mudah untuk dilakukan; (4) apa reputasi dari negara yang mengancam? Jika negara yang mengancam memiliki reputasi membuat ancaman yang kredibel, maka akan lebih mudah untuk membujuk lawan agar patuh terhadap syarat yang diajukan.

Poin keempat dari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari koersif diplomasi yang dilakukan adalah apakah tenggat waktu yang diberikan bersifat kredibel? Permintaan mungkin sah dan ancaman dapat dipercaya, tetapi jika tenggat waktunya terlalu ketat atau malah sebaliknya, kemungkinannya adalah bahwa negara terancam tidak akan mudah patuh. Kemudian poin selanjutnya adalah aktor mana yang paling termotivasi untuk

memenangkan negosiasi? Aktor mana yang paling termotivasi secara absolut? Motivasi pada dasarnya tergantung pada ukuran kepentingan nasional yang terlibat. Jika ada kepentingan vital yang dipertaruhkan, kemungkinannya adalah negara akan sangat termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Poin terakhir yang menentukan kesuksesan diplomasi koersif yaitu aktor mana yang paling termotivasi dalam hal relatif? Bahkan jika ada kepentingan substansial yang terlibat untuk kedua negara, ada kemungkinan bahwa salah satu dari mereka lebih termotivasi daripada yang lain dalam hal relatif.

Diplomasi koersif mungkin tampak seperti alternatif yang menarik untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya eskalasi atau juga untuk pergi berperang. Di sisi lain, seperti Robert Art dan Patrick Cronin menyatakan bahwa diplomasi koersif sulit untuk dilakukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang relatif rendah.

PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Saudi-Qatar

Konflik Saudi-Qatar bukan merupakan sebuah hal baru dalam hubungan antar kedua negara. Ketika Qatar membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan Tiongkok pada tahun 1998 dianggap sebagai langkah yang menyimpang dari nilai yang dianut Saudi. Akan tetapi Qatar beranggapan bahwa perlunya langkah tersebut diambil demi tercapainya keseimbangan antara pemain utama di dunia internasional. Pada tahun 1992, Saudi-Qatar terlibat dalam konflik perbatasan yang menewaskan dua tentara dan mengambil satu sandera. Hal ini menyebabkan Qatar untuk menarik keluar dari Perjanjian Demarkasi Perbatasan 1965 dan menarik kontingen militer GCC-nya

dari Operasi *Desert Shield*. Bentrokan diperbarui pada tahun 1993 dan 1994, memuncak dalam penolakan Qatar untuk menandatangani dokumen bilateral tentang keamanan atau berpartisipasi dalam KTT GCC.

Pada tahun 1995 persetujuan Saudi-Qatar terjadi lagi terkait dengan gas alam yang dimiliki Qatar (Champion, 2017). Emir Qatar pada masa itu, Hamad bin Khalifa Al Thani—ayah emir Qatar saat ini, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani—melengserkan penguasa sebelumnya yang pro-Saudi. Pada saat bersamaan, Qatar melakukan pengiriman perdana gas alam cair dari *reservoir* atau cadangan terbesar di dunia di lepas pantai *North Field* yang luasnya setara dengan wilayah Qatar. Ladang gas tersebut memiliki hamparan 9,700 sq-km yang menampung setidaknya 43 triliun meter kubik cadangan gas. Bagian selatan Qatar dikenal sebagai Lapangan Utara, sementara bagian Iran ke utara disebut Pars Selatan. Kedua negara berbagi hak eksplorasi di wilayah tersebut, dan ini adalah salah satu dari banyak ikatan yang mengikat antara Qatar dan Iran (Champion, 2017).

Cadangan gas alam dalam jumlah besar itu tak hanya mengubah Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita tahunan mencapai US\$ 130 ribu, tapi juga menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Fokus Qatar pada pengelolaan gas, membuat negara itu berjarak dengan para tetangganya di GCC yang menyandarkan perekonomiannya pada minyak bumi—sekaligus menjauhkannya dari dominasi Saudi (Champion, 2017).

Pada 2014 Saudi bersama sekutunya menanggukuhkan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar selama beberapa

bulan dengan menarik duta besar dari Doha. Alasan pemutusan hubungan diplomatik saat itu dikarenakan Saudi dan sekutu menuding Qatar mendukung Presiden Mesir terguling, Muhammad Mursi, dan kelompok terlarang Ikhwanul Muslimin.

Puncaknya pada Juni 2017 lalu di mana kisruh Saudi-Qatar terjadi lagi dengan memutus hubungan diplomatik. Langkah Saudi diikuti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Beberapa hari setelah krisis, Saudi mengirimkan tiga belas tuntutan ke Qatar melalui Kuwait. Tiga belas tuntutan, secara resmi disampaikan kepada Duta Besar Kuwait di Riyadh, dianggap sebagai manifestasi dari ketidaksukaan pribadi Putra Mahkota Muhammad bin Salman kepada Qatar, dan eksploitasi kesempatan untuk menyebabkan Qatar jatuh ke dalam keburukan.

Saudi melihat kebijakan luar negeri Qatar yang independen sebagai sebuah masalah dan sering berlawanan dengan kebijakan Saudi. Doha ingin mempunyai peran yang lebih besar sehingga memunculkan kebijakan luar negeri yang independen melalui kebijakan mediasi dalam konflik regional, seperti mendukung Hamas. Lalu Qatar juga terlihat mendukung Mursi pada krisis di Mesir tahun 2013, di mana saat itu Saudi dan UAE mendukung untuk penggulingan Mursi. Pada konflik di Suriah, Doha mengadopsi kebijakan luar negeri yang independen dengan mendukung kelompok islamis moderat bersama Turki di mana Saudi dan negara Teluk lain mendukung kelompok oposisi. Qatar juga menggunakan media Al-Jazeera untuk mengkritik pemerintahan regional yang dianggap sebagai langkah ikut campur dalam urusan negara Teluk lainnya. Salah

satu masalah yang pernah muncul adalah pada tahun 2002, Riyadh menarik duta besar dari Doha setelah Al-Jazeera memberitakan kritik dari duta besar mereka terhadap Rencana Damai yang menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai alat tukar untuk perdamaian di Palestina. Doha tidak melakukan kebijakan yang dikordinasi oleh Saudi tersebut dan menjadi sebuah problem yang besar bagi Saudi. Qatar ingin keluar dari bayangan Saudi yang selama ini mendominasi kawasan.

13 Tuntutan Arab Saudi dan Sekutu terhadap Qatar

Arab Saudi dan sekutunya mengajukan 13 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar agar bisa terbebas dari blokade yang dilakukan. Berikut isi dari 13 tuntutan tersebut, yaitu: (1) Qatar harus menjauhi Iran dan memutus hubungan diplomatik; (2) Qatar harus menutup kantor berita Al-Jazeera; (3) Qatar harus menutup basis militer Turki di negaranya; (4) Qatar harus membayar biaya ganti rugi pada 4 negara teluk akibat kerusakan di masa lalu imbas dari politik luar negeri Qatar; (5) Qatar harus memutus jaringan dan bantuan terhadap organisasi teroris seperti ISIS, Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda, dan Hizbullah; (6) Qatar dilarang ikut campur urusan dalam dan luar negeri empat negara teluk tersebut; (7) Qatar harus selalu menjaga hubungan yang damai dengan negara teluk; (8) Qatar juga harus menutup media lain selain Al-Jazeera; (9) Arab Saudi harus diizinkan untuk mengaudit tindakan Qatar terhadap tuntutan ini setiap bulan selama setahun, setiap tiga bulan pada tahun kedua, dan setahun sekali pada tahun ketiga hingga tahun kesepuluh; (10) Qatar harus menyerahkan semua catatan yang

menunjukkan dukungan mereka terhadap oposisi di luar negeri; (11) Qatar dilarang memberikan kewarganegaraan terhadap warga Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Mesir; (12) Qatar harus menghentikan mendanai teroris individu di atas dan di luar kelompok yang sebelumnya dilarang oleh Arab Saudi; (13) lakukan semua tuntutan dalam 10 hari (Al-Jazeera, 2017).

Faktor Iran dan Turki

Tuduhan yang digunakan Arab Saudi dan sekutu sebagai alasan untuk membenarkan tindakan terhadap Qatar dalam krisis GCC ini di antaranya adalah memutus hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup pangkalan militer Turki di Doha. Iran dan Turki adalah negara-negara yang mulai mengirim bantuan kemanusiaan baik melalui laut dan udara ke Doha ketika blokade telah berlangsung. Presiden Erdogan menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan Saudi kepada Qatar merupakan kesalahan besar dan menggambarkan isolasi Qatar sebagai hal yang tidak manusiawi dan melawan nilai-nilai Islam (NPR, 2017).

Iran, yang bertentangan dengan Arab Saudi lama, telah menyerukan kedua pihak yang bertikai untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan alasan bahwa ketegangan yang terus berlanjut hanya akan mengancam kepentingan semua orang di wilayah ini (Regencia, 2017). Iran melihat kebuntuan diplomatik saat ini sebagai peluang untuk meningkatkan kekuatannya dengan Qatar. Ketegangan yang semakin meningkat antara Qatar dan negara-negara Arab lainnya juga memberi kesempatan untuk melemahkan GCC dan aliansi Arab-AS yang dibuat pada kunjungan Trump ke Riyadh untuk memerangi terorisme (dan

melawan Iran dan proksinya) di kawasan tersebut.

Saudi tidak menyukai hubungan antara Qatar dan Iran yang belakangan ini terjalin lebih erat. Saudi menganggap Iran sebagai faktor utama akan terjadinya ketidakstabilan di kawasan dan meningkatnya tensi internal di beberapa negara seperti yang terjadi di Bahrain dan Yaman. Riyadh mengklaim memiliki bukti atas tuduhan Teheran ikut campur dalam urusan dalam negeri di beberapa negara Teluk dan melakukan provokasi terhadap konflik sektarian. Qatar dan Iran yang memiliki hubungan yang signifikan terutama di bidang ekonomi karena berbagi ladang gas yang sama membuat Qatar terlihat netral di antara Saudi dan Iran. Saudi beranggapan sikap Qatar tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan Qatar menuju Iran untuk bekerja sama lebih jauh.

Terkait krisis yang terjadi antara Saudi dan Qatar menempatkan Doha akan dua pilihan; ikut dan patuh terhadap Saudi sehingga terbebas dari blokade, atau mencari rekanan baru guna menyeimbangkan dominasi Saudi di kawasan. Secara geografis, Iran adalah satu-satunya negara yang terbuka bagi Qatar di tengah kepungan blokade yang dilakukan oleh Saudi dan sekutunya. Qatar juga menyatakan tidak akan patuh sama sekali terhadap ultimatum Saudi dan roda pemerintahan Qatar akan terus berjalan walaupun blokade dilakukan untuk selamanya.

Qatar-Turki telah menandatangani perjanjian militer mereka pada 19 Desember 2014, dan Turki telah mendirikan pangkalan militer di Qatar. Setelah konflik Saudi-Qatar memanas lagi, Turki langsung meratifikasi kerja sama militer mereka dan mengerahkan 5.000

tentara ke Doha. Tindakan Turki tersebut bukan dikarenakan ingin meningkatkan konflik; sebaliknya, kehadiran tentara akan membuka jalan untuk memecahkan krisis melalui diplomasi.

Sebagai dua negara kuat di Timur Tengah, Turki, dan Iran selalu menjadi teman bagi mereka yang membutuhkan dan selalu memilih jalan yang manusiawi. Penting juga bagi para pemimpin dunia untuk berbicara kepada Saudi dan Qatar, terus memberikan pesan rekonsiliasi dan menunjukkan bahwa mereka mendukung diplomasi untuk mengakhiri krisis yang tidak menyenangkan ini.

Analisis Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi

Diplomasi koersif yang ditunjukkan oleh Arab Saudi tidak ditanggapi sama sekali oleh Qatar yang beranggapan tuntutan tersebut tidak berdasar dan merupakan cara Saudi untuk melanggar kedaulatan Qatar. Arab Saudi merupakan negara yang berpengaruh di kawasan Teluk dan tentu selalu berusaha agar pengaruhnya dapat selalu tertanam di negara-negara kecil lainnya. Jika kita melihat dari faktor-faktor yang dijabarkan oleh Alexander L. George yang memengaruhi berhasil atau tidaknya koersif diplomasi yang dilakukan suatu negara, dapat dilihat jika tujuan ultimatum Saudi dapat dianggap wajar dikarenakan agar dapat terjadinya persatuan dalam menghadapi suatu isu, dalam hal ini menghadapi isu terorisme dan ekstrimisme. Akan tetapi, sebuah negara tentu tidak dapat memaksakan kehendak apabila terdapat perbedaan cara negara memandang sebuah masalah. Arab Saudi dan sekutu memberlakukan blokade darat, laut, dan udara imbas dari Qatar menolak

untuk mematuhi persyaratan yang diberikan.

Dalam pandangan penulis, jika Qatar mematuhi permintaan Saudi maka bukan tidak mungkin di masa mendatang Qatar akan selalu menjadi bayang-bayang Saudi. Oleh karenanya Qatar menolak untuk patuh demi mempertegas kedaulatan negara mereka. Menteri luar negeri Qatar juga menyatakan bahwa tuntutan tersebut dimaksudkan untuk melanggar kedaulatan Qatar, meniadakan kebebasan berbicara, memaksakan audit, dan menerapkan mekanisme pengawasan terhadap Qatar. Dan mereka juga percaya bahwa dunia diatur oleh hukum internasional yang tidak mengizinkan negara-negara besar menggertak negara-negara kecil (BBC, 2017).

Qatar sejak dulu selalu memiliki kebijakan yang independen sehingga tidak mungkin dengan mudah patuh terhadap ultimatum Arab Saudi. Selama ini Qatar dikenal sebagai negara yang kerap menjadi mediator di berbagai persoalan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tragedi kemanusiaan, seperti yang dicatat Kamrava, mungkin juga memperkuat peran regional negara, meningkatkan legitimasi, citra atau prestisenya di arena internasional. Terkadang, hal tersebut dapat digunakan sebagai 'strategi bertahan hidup' (Kamrava, 2011). Qatar berusaha menjalin kerja sama dengan negara lain bahkan dengan musuh sekalipun demi terjadinya perimbangan. Embargo yang dilakukan Saudi pada awalnya menyulitkan perekonomian Qatar karena satu per tiga suplai dalam negeri berasal dari Saudi, Bahrain, dan UAE. Akan tetapi dukungan dari Iran dan Turki membuat Qatar menjadi kuat dalam menghadapi krisis diplomatik ini dan menganggap bahwa Doha bisa hidup

selamanya di bawah embargo Arab Saudi (QatarDay.com, 2017). Krisis antarnegara Teluk telah merongrong keamanan dan prospek ekonomi di kawasan tersebut. Terlepas dari tindakan permusuhan dari negara-negara tetangga, Qatar telah mengembangkan jalur perdagangan internasional baru dan mempercepat keragaman ekonomi. Doha bertekad mempertahankan kedaulatan dan mengambil keputusan independen yang memastikan pengembangan pembangunan termasuk menjamin kebebasan media untuk berbicara.

Jika melihat kekuatan kedua negara antara Saudi dan Qatar, tentu ada ketidakseimbangan kekuatan. Lalu apakah ancaman Arab Saudi bersifat kredibel? Ancaman yang dikeluarkan Saudi bersifat kredibel karena setelah Qatar menolak untuk mematuhi permintaan Saudi, blokade darat, laut, dan udara langsung dilakukan. Akan tetapi, setelah krisis diplomatik terjadi Qatar dan Turki meratifikasi perjanjian militer mereka di mana dianggap sebagai salah satu langkah Qatar memperkuat negara sehingga mereka bisa sedikit mengatasi tekanan dari Saudi dan sekutu. Dan juga Qatar memperbaiki hubungan dengan Iran yang merupakan musuh lama Saudi di kawasan. Qatar memiliki batas maritim dengan Iran dan menggantungkan pada wilayah udara Iran (Knell, 2018). Qatar dianggap telah menyiapkan diri untuk hal apapun terjadi, karena sampai kapanpun Qatar tidak akan pernah patuh terhadap ultimatum Saudi dan sekutunya. Sehingga blokade Arab Saudi akan sia-sia dikarenakan Qatar masih bisa tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Krisis Qatar ini masih jauh untuk terjadinya eskalasi menuju militer. Akan tetapi langkah-langkah Qatar dalam

menambah kekuatan militer mereka sejak terjadinya blokade akan membuat Qatar lebih siap jika suatu saat konflik menuju ke eskalasi militer. Alasan lain pembelanjaan alat militer besar-besaran adalah kebutuhan asli Qatar untuk perlindungan, dan angkatan bersenjata profesional yang dilengkapi dengan senjata berteknologi tinggi di tengah meningkatnya ancaman konvensional dan non-konvensional terhadap keamanan nasional (Bakeer, 2017). Dengan demikian Qatar telah siap jika suatu waktu krisis berubah menuju eskalasi militer dan Qatar tidak takut akan terjadinya eskalasi tersebut.

Tenggat waktu 10 hari yang diberikan Saudi kepada Qatar untuk memenuhi seluruh permintaan merupakan tenggat waktu yang sangat singkat, apalagi isi permintaan tersebut terlalu besar. Penulis berpendapat bahwa waktu 10 hari tidak akan cukup untuk melakukan semua permintaan tersebut. Qatar juga tidak akan pernah mematuhi permintaan Saudi sehingga walaupun tenggat waktu yang diberikan cukup lama, permintaan yang begitu besar akan sulit dipenuhi.

Baik Qatar maupun Saudi tentu mempunyai sudut pandang masing-masing mengenai krisis yang terjadi. Kedua aktor negara tersebut tentu saling mempunyai motivasi demi kepentingan nasional masing-masing. Qatar telah melakukan investasi besar-besaran dalam strategi *soft power* yang pilar-pilarnya mencakup olahraga dan kebijakan luar negeri, serta menempa aliansi strategis yang dirancang untuk meningkatkan reputasi globalnya sebagai warga negara internasional yang terkemuka, berwawasan ke depan, dan modern (Dorsey, 2015). Qatar tidak akan mudah patuh terhadap negara yang mencoba ikut campur dalam urusan dalam

negeri mereka. Dalam krisis ini, Qatar tentu dapat mengatasi blokade di mana mereka juga merupakan negara yang kuat dalam ekonomi dan faktor Iran dan Turki yang dapat menjadi kunci Qatar menghadapi tekanan Saudi dan sekutu. Seperti contoh saat sebelum krisis, Qatar tidak memiliki peternakan dan kebutuhan susu diimpor dari Arab Saudi, akan tetapi saat ini Qatar telah memiliki peternakan sapi di mana sapi-sapi tersebut didatangkan dari Amerika Serikat (Kneel, 2018). Sangat jelas bahwa ultimatum Saudi hanya akan sia-sia dan berlarut-larut tanpa kejelasan dikarenakan Qatar mulai bisa lebih mandiri menghadapi krisis ini.

Amerika Serikat telah menyerukan dialog dan kerja sama untuk menyelesaikan krisis dan meminta Saudi dan sekutu untuk tidak mengambil tindakan yang tanpa kompromi (Al-Jazeera, 2017). Dialog tetap diupayakan oleh kedua negara melalui GCC dan juga negara-negara lain yang berpengaruh sebagai mediator agar krisis diplomatik ini benar-benar selesai. Qatar yang tidak menunjukkan rasa takut sama sekali terhadap Saudi mengindikasikan mereka telah benar-benar menjalankan politik secara independen dan bebas untuk berhubungan dengan siapapun.

KESIMPULAN

Kegagalan Saudi dalam mengultimatum Qatar bisa jadi dikarenakan oleh beberapa hal. Puncak dari diplomasi koersif itu bisa berbentuk perang terbuka. Qatar yang merupakan negara kecil sangat pintar dalam memainkan perannya di kawasan, sehingga membuat Arab Saudi harus mencari berbagai cara agar Qatar bisa dikendalikan. Kegagalan diplomasi koersif Saudi bisa jadi disebabkan oleh Qatar yang

langsung mencari rekanan baru yang dapat menyeimbangi Saudi secara kekuatan militer maupun ekonomi. Qatar yang didukung oleh poros Ankara-Teheran dianggap sudah cukup kuat melawan Saudi dan meyakini krisis ini tidak akan menjadi perang terbuka. Krisis ini juga dapat menjadi jalan keluar Qatar dari GCC dan menjauhkan diri dari blok Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Poros Doha-Ankara-Teheran sudah sangat cukup untuk menyeimbangi hegemoni Saudi di kawasan.

Dari perspektif militer, krisis GCC menyoroti kekurangan serius dalam kemampuan militer Qatar. Pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, al-Udeid tidak membantu mencegah krisis yang sedang terjadi karena Amerika Serikat berada di pihak Saudi. Sehingga pengadaan militer besar yang dilakukan Qatar diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam strategi militer Qatar. Jika strategi aliansi gagal di masa depan, peralatan militer tersebut akan berfungsi sebagai kebijakan asuransi yang akan menyediakan waktu yang diperlukan untuk organisasi internasional atau kekuatan lain untuk campur tangan dalam pertahanan Doha. Peralatan militer tersebut mungkin tidak memberikan perlindungan penuh terhadap agresi kekuatan besar, akan tetapi setidaknya dapat mempromosikan strategi militer Qatar yang mandiri dan akan membantu negara kecil di Teluk untuk dengan tegas menolak pendiktean yang berasal dari negara-negara besar.

Reputasi Saudi sebagai negara besar di kawasan tidak akan membawa krisis ini lebih jauh. Aliansi dan memperkuat peralatan militer merupakan salah satu cara untuk membuat keadaan dalam negeri terasa aman dan juga dapat meredakan agresi dari kekuatan besar yang

mencoba ikut campur urusan dalam negeri. Hal ini terbukti dalam kasus pada krisis Saudi-Qatar ini di mana ultimatum tersebut tidak membuat Qatar gentar menghadapi blokade yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan diplomasi koersif yang dilakukan Saudi gagal dikarenakan Qatar tidak patuh sama sekali akan tuntutan tersebut.

REFERENSI

- Akpınar, P. (2015). Mediation as a Foreign Policy Tool in the Arab Spring: Turkey, Qatar and Iran. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 17(3), pp. 252-268.
- Al-Jazeera. (2017, Juli). Arab States Issue 13 Demands to end Qatar-Gulf Crisis. Diakses 19 November 2017 dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>
- Al-Jazeera. (2017, Juni). Russia Call Dialogue Qatar-GCC Dispute. Diakses 10 September 2018 dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/06/russia-call-dialogue-qatar-gcc-dispute-170611132858154.html>
- Bahi, R. (2017). Iran, the GCC and the Implications of the Nuclear Deal: Rivalry versus Engagement. *The International Spectator*, 52(2), pp. 89-101.
- Bakeer, A. (2018, Maret). Making Sense of Qatar's Military Buildup. *Gulf International Forum*. Diakses 20 April 2018 dari <http://gulfif.com/making-sense-of-qatars-military-buildup/>
- BBC. (2017, Juli). Qatar is Given A Further 48 Hours to Meet Gulf Demands. Diakses 21 Juni 2018 dari

- <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40476821>
- BBC. (2017, Juni). Alasan 4 Negara Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar. Diakses 10 November 2018 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40155610>
- Byman, D. L., Waxman, M. C. & Larson, E. (1999). *Air Power as a Coercive Instrument*, California: RAND Corporation.
- Champion, M. (2017). Saudi Dispute with Qatar has 22-Year History Rooted in Gas. Diakses 19 Mei 2018 dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-06/saudi-arabia-s-feud-with-qatar-has-22-year-history-rooted-in-gas>
- Cooper, A. F. & Momani, B. (2011). Qatar and Expanded Contours of Small State Diplomacy. *The International Spectator*, 46(3), pp. 113-128.
- Daili Mail. (2018, Maret). Qatar Signs 3-Bn Euro Military Helicopter Deal. Diakses 16 Mei 2018 dari <https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5501583/Qatar-signs-3-bn-euro-military-helicopter-deal.html>
- Dorsey, J. M. (2015). How Qatar is Its Own Worst Enemy. *The International Journal of the History of Sport*, 32(3), pp. 422-439.
- Fahy, J. (2018). International Relations and Faith-based Diplomacy: The Case of Qatar. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(3), pp. 76-88.
- Ferida, K. (2017, 5 Juni). Ini Alasan 4 Negara Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar. <https://www.liputan6.com/global/read/2978743/ini-alasan-4-negara-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-qatar>
- Heard-Bey, F. (2006). Conflict Resolution and Regional Co-operation: The Role of the Gulf Co-operation Council 1970-2002, *Middle Eastern Studies*, 42(2), pp. 199-222.
- Jentleson, B. W. (1991). The Reagan Administration and Coercive Diplomacy: Restraining More than Remaking Governments, *Political Science Quarterly*, 106(1), pp. 57-82.
- Jervis, R. (2013). Getting to Yes with Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy. *Foreign Affairs*, 92(1), pp. 105-115.
- Kamrava, M. (2011). Mediation and Qatari Foreign Policy, *Middle East Journal*, 65(4), pp. 539-556.
- Khalidi, W. (1991). The Gulf Crisis: Origins and Consequences, *Journal of Palestine Studies*, 20(2), pp. 5-28.
- Knell, Yolande. (2018, 5 Juni). Setahun Diboikot, Qatar 'Tidak Juga Tumbang'. Diakses 10 September 2018 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44372341>
- Lauren, P. G., Craig, G. A., & George, A. L. (2007). *Force and Statecraft: Diplomatic Problems of Our Time* (Fourth Edition), New York: Oxford University Press.
- NPR. (Juni, 2017). Qatar-Saudi Crisis Has Decades Longroots. Diakses 15 Desember 2017 dari <http://www.npr.org/sections/parallels/2017/06/17/533054129/qatars-crisis-with-saudi-arabia-and-gulf-neighbors-has-decades-longroots>
- Pradhan, P. K. (2011). The GCC-Iran Conflict and its Strategic Implications for the Gulf Region,

- Strategic Analysis*, 35(2), pp. 265-276.
- QatarDay.com. (2017, Oktober). Qatar Can Forever Stay Under A Blockade. Diakses 15 Januari 2018 dari <https://www.qatarday.com/news/local/qatar-can-forever-stay-under-a-blockade-qp/51088>
- Rabi, U. (2009). Qatar's Relations with Israel: Challenging Arab and Gulf Norms, *Middle East Journal*, 63(3), pp. 443-459.
- Regencia, T. (2017, 6 Juni). *Qatar-Gulf rift: the Iran Factor?* Diakses 10 Juni 2017 dari <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/qatar-gulf-rift-iran-factor-170605102522955.html>
- Roberts, D. B. (2014). Qatar and the Brotherhood, *Survival*, 56(4), pp. 23-32.
- Sauer, T. (2007). Coercive Diplomacy by the EU: The Iranian Nuclear Weapons Crisis. *Third World Quarterly*, 28(3), pp. 613-633.
- Shayan, F. (2013). Geopolitical Subjectivity in Iran-GCC Relations: The Three Islands Issue Since 1979. *Geopolitics*, 18(3), pp. 633-661.
- Shield, R. (2018). The Saudi Air War in Yemen: A case for Coercive Success through Battlefield Denial. *Journal of Strategic Studies*, 41(3), pp. 461-489.